

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi secara etimologis mempunyai akar dari Bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti kekuasaan rakyat dan *kratos* atau kekuatan. Sistem demokrasi menjadi salah satu sistem yang paling populer di dunia, hal ini didasarkan atas hasil laporan *The Economist* yang menunjukkan bahwa separuh dari negara di dunia menganut sistem demokrasi (The Economist, 2017, p. 02). Meskipun hampir dari separuh negara di dunia menganut demokrasi namun masih banyak negara – negara di dunia yang belum bisa mewujudkan demokrasi penuh (The Economist, 2017, p. 03). (Smith, 2012) hasil hasil penelitian ini memperoleh data bahwa sistem politik (*candidate centered elections*) yang memberikan keuntungan bagi keluarga politik karena kerabat politik petahana sudah lebih dikenali oleh masyarakat. Dalam penelitian ini juga menjelaskan Dinasti Politik dapat maju pada era demokrasi karena kandidat *incumbent* desentralisasi rekrutment sistem pemilu berpusat pada kandidat.

Demokrasi semu lebih lebih mementingkan kepentingan pribadi untuk dirinya sendiri maupun keluarga, tetapi dengan alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga dan konstitusi negara. Alat demokrasi tersebut bukan semata-mata hanya untuk menopang sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini melainkan sebagai manipulasi sistem demokrasi yang ada. Secara lebih sempit lagi politik digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan atau penimbunan kekuasaan melalui rakyat dibayar untuk menyampaikan manipulasi suaranya. alat perbutan kekuasaan dan menambah kekayaan keluarga untuk diturun temurunkan ke anak dan cucu pelaku politik dinasti.

Sementara rakyat rela dibayar dengan nominal uang sesuai dengan kesepakatan untuk melegalkan manipulasinya tersebut melalui pemilu, pilkada dan aksi-aksi protes lainnya.

Memang, di dalam demokrasi modern politik dinasti tetap bisa ada. Sebagai contoh beberapa tipe politik dinasti dalam elit perpolitikan sekarang. Dalam bentuk yang lain, politik dinasti muncul dalam gejala politik dinasti yang mendorong kerabat keluarga dekat untuk tetap melenggangkan kekuasaan yang sudah dicapai oleh keluraganya saat ini. Dalam politik dinasti semacam ini penyesuaian terhadap etik demokrasi modern dilakukan dengan berbagai carai yaitu menyiapkan putaputi mereka yang mempunyai sangkutan dalam hal pendidikan melainkan rekrutmen politik yang sedemikian dini. Jadi apabila hal terseut muncu bukan karena disebabkan oleh karena faktor darah atau keluaraga yang membelakangi latar belakang mereka, melainkan oleh karena faktair-faktor kepolitikan yang lebih wajar dan rasioanal.

Menurut (Held , 1992), sejak zaman Yunani praktek demokrasi lokal telah dikonsepsikan dan menjamin warganya menikmati kesetaraan politik sehingga meeka mempunyai kebebasan untuk memerintah maupun diperintah. Dalam demokrasi klasik mempunyai ciri-ciri pandangan sebagai berikut ini : (1) masyarakat berperan langsung untuk memilih dan menentukan legislative dan yudikatif. (2) kekuasaan tertinggi adalah majelis rakyat. (3) urusan umum adalah kekuasaan tertinggi. (4) tidak ada hak sitimewa bagi rakyat biasa maupun pejabat publik. (5) pejabat publik tidak boleh memggang jabatan lebih dari dua periode.

Tahun 1998 adalah merupakan babak baru dalam sistem politik di Indonesia, pada tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. Reformasi politik yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun memberiksn manfaat yang besar bagi dinamika system politik di Indonesia. Undang-undang No.tahun

1999 telah mengatur sistem demokrasi di Indonesia tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya peraturan ini sistem pemerintah asas desentralisasi dimana daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri kecuali lima urusan nasional, peraturan ini menyeluruh, salah satunya dalam hal pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut (Smith, 2012) negara berkembang seperti Indonesia sangat menghargai masalah kebebasan berpendapat dan HAM. Kebebasan itu sendiri bukan berarti kebebasan yang tidak mempunyai batas. Penelitiannya mempunyai data bahwa (*candidate centered election*) adalah kandidat yang lebih mengarah pada penguntungan keluarga politik yang lebih mempunyai nama terlebih dahulu, selain itu politik dinasti justru lebih terlihat berkembang pada masa demokrasi saat ini dengan keunggulan *incumbent* desentralisasi dalam pemilu dan rekrutmen yang terpusat.

Adanya politik dinasti ini tentunya sangat berpengaruh pada politik yang ada di Indonesia. Walaupun politik dinasti ini tentunya tentunya tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang ada. Sistem demokrasi mempunyai ciri-ciri yaitu kekuasaan pemerintah yang terbatas negara hukum yang tunduk pada *rule of law* dan lebih berhati-hati terhadap memperlakukan warga negaranya. Politik dinasti muncul dalam dimensi yang lebih alami, berupaya mendorong sanak keluarga elite-elite incumbent untuk terus memegang kekuasaan di pemerintahan yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka. Jika dilihat pada normatif konstitusi menegaskan setiap warga negara mempunyai kedudukan HAK yang sama dimata hukum, karena termasuk untuk mengikuti atau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Namun tetap saja politik dinasti ini kian hari kian meresahkan dan tentunya dapat mencederai demokrasi. Pada posisi lain politik dinasti ini hanya menghasilkan pemimpin yang prematur dan belum layak uji dimasyarakat. Karena mereka lahir dari keluarga yang mapan sebagai keluarga politik bukan sebagai pejuang politik. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan karena tidak adanya larangan konstitusi. Jika dilihat dari atauran jabatan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melewati proses jabatan adari yang terendah ke atas supaya memiliki kemampuan dan rekam jejak dimasyarakat. Politik dinasti berlawanan dengan paham diatas karena politik dinasti berlandaskan kepentingan pribadi, sedangkan konsep demokrasi yang kita terima mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak.

Politik Dinasti yaitu reproduksi kekuasaan yang primitive karena didalamnya mengandalkan darah mauun garis keturunan dari segelintir orang yang mencoba keberuntungannya untuk tetap melenggangkan kekuasaan politik petahana. Maka didalam politik tidak ada politik publik dikarenakan publik sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan ini dinasti menjadi musuh dari demokrasi dalam arti yang substansional. Praktik dinasti di Indonesia kian mengkhawatirkan pasalnya kebanyakan penguasa hanya ingin melenggangkan oligarki kekuasaannya. Praktik politik dinasti di negeri ini cenderung semakin tak sehat, itu sebabnya sistem demokrasi di Indonesia masih mengalami pendangkalan, saat etika tidak pernah menjadi dasar dalam berpolitik.

Sehingga politik dinasti menggurita kelevel paling bawah kekuasaan. Karena itu elemen masyarakat yang masih kritis mesti bersikap, untuk tak lelah berikhtiar mencegah politik dinasti yang terbukti korup. Tantangan terbesar kedepan adalah melakukan perombakan untuk mengatasi korupsi politik dinasti dan praktik oligarki. Karena bila politik dinasti yang terbukti pernah korupsi menguasai lingkaran kekuasaan demokrasi pun akan makin bangkrut. Karena digerogeti koruptor dalam lingkaran kekuasaan. Politik

dinasti menyebabkan rakyat lemah semakin terpinggirkan. Apabila penguasa tidak lagi memikirkan rakyatnya, hanya saja memikirkan dirinya, dan kekuasaan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan meraja lela karena masyarakat akan menjadi korban masyarakat yang lemah akan semakin tertindas karena cengkraman politik dinasti.

Berdasarkan pemaparan di atas selain Politik Dinasti sudah mencederai sistem demokrasi di Indonesia juga telah mencederai sistem demokrasi politik di Bantul. Masyarakat umum juga telah menyadari bahwa Politik Dinasti telah terjadi di daerah mereka. Secara administratif Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang bupati, dimana bupati pertama adalah Raden Tumenggung Mangun Negoro yang memimpin semenjak 20 Juli 1831. Pasca reformasi atau tepatnya tahun 1999. Bantul memiliki Bupati baru yaitu Idham Samawi yang menjabat mulai tahun 1999 hingga 2004. Pada Desember 2004 hingga Januari 2005, jabatan bupati dipimpin oleh Drs. Mujono NA sebagai pelaksana tugas harian. Pada tahun 2005, terlaksana pilkada langsung pertama kali di Kabupaten Bantul dalam pilkada tersebut Idham Samawi menjadi pemenang sehingga beliau kembali menjabat sebagai bupati Bantul dari tahun 2005 hingga 2010.

Menurut (Zuly Qodir, 2015) tahun 2010 kembali dilaksanakan pilkada untuk memenuhi jabatan bupati Bantul selanjutnya. Fenomena yang menarik pada pilkada ini yaitu dimana salah satu calon Bupati adalah istri dari Idham Samawi yaitu Sri Surya Widati atau Idha Samawi. Pada pilkada Bantul tahun 2010 tersebut, terdapat tiga calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi Kardono-Ibnu Kadamanto, Sri Surya Widati-Sumarno, dan Sukardiono-Darmawan. Pasangan nomor urut pertama atau Kardono-Ibnu Kadamanto merupakan calon independen, sedangkan pasangan Ida Samawi-Sumarno diusung oleh PDIP, Golkar, PAN, dan PKPB. Pasangan Sukardiono-Darmawan diusung oleh partai Demokrat dan PKS.

PDIP memiliki alasan tersendiri untuk mengusung Idha Samawi sebagai calon kandidat Bupati Bantul. Menurut salah satu kader DPP PDIP Kabupaten Bantul yaitu bapak Arjun (2012, komunikasi personal, 2 Januari) mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakatlah yang menginginkan Idha Samawi melanjutkan kepemimpinan suaminya. Berdasarkan rapat yang dilaksanakan secara demokratis dan terbuka, pada level paling bawah yaitu rating rapat tingkat desa, sebanyak 75 desa menginginkan bahwasanya Idha Samawi menjadi Bupati Bantul untuk periode 2010-2015. Rapat itu dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat kecamatan, dimana sebanyak 17 kecamatan juga menginginkan Idha Samawi maju menjadi Bupati Bantul. Sedangkan pada Rapat Kerja Cabang Khusus tingkat Kabupaten, diputuskan bahwa Sri Suryawidati menjadi kandidat yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Bantul ditemani dengan Drs H Sumarno sebagai calon wakil Bupati Bantul. Disamping masyarakat menginginkan majunya Idha Samawi juga sudah mendapatkan rekomendasi dari partai DPP PDIP, sedangkan PDIP sendiri mengusung Idha Samawi berdasarkan dinamika politik yang ada yaitu tuntutan masyarakat, survei internal partai dan visi misi Idha Samawi yang memang mengaspirasikan kepentingan masyarakat arus bawah, dengan mewujudkan masyarakat Bantul menuju Bantul Projo Tamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Pilkada Bantul dilaksanakan 23 Mei 2010, tiga bulan sebelum berhentinya masa kepemimpinannya bupati terdahulu. Pencalonan Idha Samawi ditengarai sebagai upaya pelanggenan dan pewarisan kekuasaan kepemimpinan dari Idam Samawi, meskipun dari pihak internal calon meneriakkan bahwa pencalonan Idha dikarenakan dukungan dari masyarakat Bantul. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 tidak dilalui dengan mudah, dalam proses kampanye banyak sekali tindakan dari masing-masing calon yang dengan keras menarik perhatian pemilih.

Namun apabila dicermati lebih terlihat bahwa hanya pasangan Sri Surya Widati-Sumarno dan Sukardiono-Darmawan atau pasangan nomor urut dua dan tiga. Sedangkan pasangan Kardono-Ibnu Kadarmanto terlihat lebih pasif dan kurang lancar dalam proses kampanye. Dalam hal pembiayaan kampanye, kubu Sri Surya Widati-Sumarno atau disingkat idaman, menghabiskan biaya kampanye tertinggi yaitu 1,2 Milyar, sedangkan pasangan Kardono-Ibnu Kadarmanto (Karib) sebesar Rp 13,7 juta dan pasangan Sukardiyono-Darmawan (Sukadarma) sebesar Rp 20,3 juta. Dalam proses kampanye ini dua kubu pasangan nomor urut dua dan tiga sangat aktif melakukan penyerangan dan saling sindir. Begitupula debat yang dilaksanakan oleh KPUD, dimana dua kubu ini saling nyerang satu sama lain. Terkait dengan pro kontra Idam Samawi, pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengumumkan bahwa pasangan Sri Surya Widati-Sumarno mendapatkan suara 67,77 persen dari total pemilih 691.982, sehingga otomatis menjadi pemenang dalam pilkada tersebut dengan suara terbanyak di kecamatan Sewon (36.919) dan terendah di kecamatan Piyungan (15.667), dimana sebagian besar penduduknya (56%) adalah petani. Diurutan kedua adalah pasangan calon Sukardiyono-Darmawan Manaf yang meraih 137.888 suara atau 28,26 persen. Sedangkan posisi terakhir ditempati Kardono-Ibnu Kadarmanto yang hanya meraih sebanyak 19.375 suara atau 3,97 persen dari suara keseluruhan (Zuly Qodir , 2015).

Kemenangan keluarga ini dalam menerapkan politik dinasti berhasil pada dua periode pemerintahan, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan loyaltitas dari pendukung pasangan politik petahana tersebut. Dari dua periode politik petahana tersebut masing masing berhasil memelihara pendukung setianya dengan baik. Artinya kepala daerah pertama yang memenggang kekuasaan terlebih dahulu berhasil merebut simpatisan masyarakat maupun telah membentuk pendukung setia untuk tetap

mendukung keluarga dari Idham Samawi untuk memimpin daerahnya dengan berbagai keuntungan dalam bentuk materi maupun nonmateri.

Dalam konsep pertukaran sosial, mensyaratkan salah satu diantara dua pihak yang melakukan pertukaran harus memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak penerima (pihak lain tersebut) tidak memiliki sumber daya yang sama nilainya untuk dipertukarkan dengan pihak pemberi. Sehingga satu-satunya satunya cara untuk membalas pertukaran ini adalah dengan memberikan kepatuhan kepada pihak pemberi sumber daya tadi. Sehingga masyarakat yang berada pada lingkup kekuasaannya merasa mempunyai andil kepentingan untuk meneruskan dukungannya supaya tetap mempertahankan jabatannya sebagai kepala daerah, dan akan dijamin distribusi materi maupun nonmateri yang mereka peroleh.

Melihat fenomena yang terjadi tersebut, dapat diambil opini bahwa hal tersebut salah satu bentuk politik dinasti kepala daerah yang awalnya adalah pemerintahan milik sang suami dan pada masa jabatan sang suami telah berakhir kemudian digantikan oleh sang istri, hal itu menunjukkan bahwa sang suami sebagai kepala daerah generasi pertama ini telah memiliki jaringan kekuasaan yang berhasil dilanjutkan dan diperlihara dengan baik oleh istrinya untuk mewarisi jabatan generasi kepala daerah berikutnya.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan, terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu pada, namun yang menjadi perbedaan penelitian pada pemilu pada di Kabupaten Bantul tahun 2015 ini dengan penelitian yang sebelumnya ialah lebih spesifikasi pada persepsi masyarakat terhadap politik dinasti di Bantul.

Pemilukada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 merupakan kebijakan baru yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

dalam penyelenggaraan pilkukada di Indonesia. Pilkukada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diikuti oleh 3 kabupaten yakni di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 269 daerah yang melaksanakan pilkukada secara serentak, pilkukada ini dilaksanakan di 1.768 Tempat Pemilihan Suara (TPS), dan diikuti oleh 685.920 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dimana pelaksanaannya dianggarkan sebesar Rp 23.496.868.500 dan dana ini ditetapkan tanggal 15 mei 2015 setelah terbitnya Permendagri no 44 tahun 2015. Suprta dalam media pada tanggal 27 oktober 2015 mendeskripsikan bahwa pilkukada di Kabupaten Bantul hanya di ikuti oleh 2 pasangan calon kepala daerah, yakni Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim) yang diusung oleh koalisi PKB, PKS, Partai Gerindra serta Partai Demokrat.

Visi yang diangkat ialah “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” dengan 5 misi yang mengikuti visi tersebut. Sedangkan pasangan pesaing ialah Sri Suryawidati dan wakilnya Misbakhul Munir (Ida-Munir) yang diusung oleh koalisi PDI-P, Nasdem serta didukung oleh partai Golkar dengan mengangkat visi “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis” serta ada 3 misi yang mengikuti visi tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 59 ayat 2 UUD no 12 tahun 2008, partai politik atau koalisi dapat mengajukan pencalonan 5 pasangan kandidat tersebut bila telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah bersangkutan.

Pengusung Suharsono-Halim yakni PKB memiliki 4 kursi di DPRD, sedangkan Partai Gerindra memiliki 6 suara di DPRD. Begitu pula dengan partai politik pengusung koalisi Ida-Munir yakni PDIP yang memiliki 12 kursi, dan partai Nasdem yang memiliki

2 kursi di DPRD. Berdasarkan perolehan kursi di DPRD tersebut, semua partai politik yang mengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu tahun 2015 sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membuat sebuah koalisi. Sedangkan untuk perolehan suara sah dari setiap partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD tahun 2014 di Kabupaten Bantul terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2014

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi						Jumlah Suara Sah	%
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
1	Partai NasDem	3.368	3.444	2.841	5.595	6.152	10.672	32.072	5.72
2	PKB	15.617	6.102	16.520	10.012	5.977	3.295	57.523	10.26
3	PKS	8.086	7.706	7.233	8.269	5.128	5.679	42.101	7.51
4	PDI-P	17.517	29.583	19.912	28.228	28.875	27.321	151.436	27.01
5	Partai Golkar	6.812	4.765	7.058	7.958	9.336	6.353	42.282	7.54
6	Partai Gerindra	19.052	13.872	17.764	8.882	4.660	11.434	75.514	13.47
7	Partai Demokrat	4.420	3.649	4.349	4.185	6.600	5.181	28.384	5.06
8	PAN	12.269	12.507	8.258	14.780	12.887	8.933	69.635	12.41
9	PPP	6.290	7.749	5.157	4.934	6.769	7.108	38.007	6.78
10	Partai Hanura	2.010	2.004	901	1.817	3.451	850	11.033	1.97
14	PBB	844	558	261	5.988	2.958	493	11.102	1.98
15	PKPI	321	173	117	254	523	250	1.638	0.29
Jumlah		96.606	92.112	90.282	100.842	93.316	87.569	560.727	100

Sumber : KPU Kabupaten Bantul tahun 2014

Majunya pasangan Suharsono-Halim ini mampu memupuskan kekhawatiran tertundanya pilkada di Kabupaten Bantul, meskipun majunya pasangan Suharsono-Halim tidak lepas dari rumor yang tidak baik, pasangan ini dianggap sebagai calon boneka yang sengaja dimunculkan oleh pasangan Ida-Munir. Kemunculan isu calon boneka ini berawal dari sebelumnya titik temu komunikasi politik yang dibangun antara partai-partai di Kabupaten Bantul, padahal purnawirawan polisi yang pernah bertugas di Mabes Polri ini sudah jauh-jauh hari berupaya mencari partai pendukung dan pasangan bakal calon wakil bupati, selain itu pasangan pertahana terlalu kuat dan sulit untuk ditandingi.

Mendengar rumor yang beredar menjelang pilkada tersebut berlangsung, Suharsono membantah tegas anggapan dirinya sebagai calon boneka, dengan tegas dan mengucap sumpah ia menyatakan sebuah bantahan terkait rumor tersebut selepas mendaftarkan diri di KPU pada Selasa 28/7/15 yang dikemukakan oleh Afifi. Dari hasil pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 yang lalu, kemenangan diarah oleh koalisi pasangan Harsono-Halim dengan suara terbanyak yaitu sebesar 261.412 suara atau 52,8%. Sedangkan kolisi pasangan pesaing hanya mendapatkan 233.677 suara atau 47,2%. Hasil kemenangan tersebut dapat digambarkan dalam table berikut :

Tabel 1. 1 Hasil suara Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015

No	Pasangan Calon	Partai Koalisi	Hasil Suara	Presentase (%)
1	Suharsono - Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim)	PKB, PKS, Partai Gerindra Partai Demokrat	261.412	52,8%
2	Sri Suryawidati - Misbakhul Munir (Ida-Munir)	PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar	233.677	47,2%

Sumber : KPU Kabupaten Bantul tahun 2014

Untuk itu penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap politik dinasti kepala daerah. Menurut (Jalaluddin, 2000) bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavit, 1997:27 dalam Soekanto).

Dalam persepsi dibutuhkan adanya objek atau stimulus yang mengenai alat indera dengan perantaraan syaraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses psikologis). Selanjutnya, dalam otak terjadilah sesuatu proses hingga individu itu dapat mengalami persepsi (proses psikologis). Persepsi secara umum merupakan respon dari masyarakat untuk evaluasi yang ditujukan terhadap suatu objek dan dinyatakan secara verbal. Sedangkan persepsi mempunyai bentuk-bentuk yang dapat disampaikan setelah mengetahui objek pandangan kapan saja, dimana saja.

Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup dari penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang lainnya. Sebab itu dalam menerima stimulus manusia mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, sehingga ini sedikit menghambat penerimaan stimulus yang telah didapatkannya. Dengan kata lain meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih walaupun tidak mempunyai relevansi dan tidak bermakna baginya. Adanya persepsi tersebut timbul dua persepsi yaitu persepsi positif dan negatif.

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat disimpulkan ialah persepsi merupakan tanggapan seseorang mengenai kejadian kejadian serta pengalaman yang sudah teralami dan

dilihat oleh individu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap politik dinasti kepala desa berdasarkan pengalaman dan hal - hal yang diketahui selama proses praktik politik dinasti tersebut berlangsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pewarisan kekuasaan politik dinasti di Kecamatan Sewon ?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik dinasti di Kecamatan Sewon.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pewarisan kekuasaan politik dinasti di Kecamatan Sewon.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik dinasti di Kecamatan Sewon

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah bahan kajian dalam studi ilmu pemerintahan dengan persepsi masyarakat umum tentang politik dinasti di Bantul.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat di Bantul, dan dapat menjadi masukan kepada pemerintah

Kabupaten Bantul terkait politik dinasti, dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengenai kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu kepala daerah di Kabupaten Bantul, diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah lainnya.

Berikut akan dijelaskan beberapa kajian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini, antara lain yakni :

Tabel 1.3 1 Tinjauan Pustaka

No	Penelitian	Hasil
1	Fitriyah, Hermini Susiatianingsih dan Supratiwi tentang Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kabupaten Batang 2011	Faktor determinan kemenangan kandidat antara lain : (1) Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya tinggi, (2) Keputusan memilih pemilih di Kabupaten Batang di dasari oleh pilihan pribadi, (3) Faktor figur dan ketokohan memainkan peran penting dalam membuat keputusan memilih, (4) Figur calon pasangan sangat signifikan berpengaruh terhadap hasil suara, dan (5) Faktor sosiologis dan psikologis juga berperan namun tidak secara signifikan
2	Sofyan A Jusuf, Mashuri Maschab (2007) tentang Studi tentang strategi politik pasangan Bandjela Paliudju dan Achmad yahya dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Gubernur Sulawesi tengah tahun 2006	Ha.sil kemenangan pemilukada di Sulawesi tengah tahun 2006 tersebut sepenuhnya disebabkan karena adanya strategi politik yang dirancang dan diterapkan oleh pasangan calon yakni strategi memperluas dukungan partai politik dan konstitusinya, strategi pencitraan figur politik, serta strategi kampanye.
3	Susilo Utomo (2013)	Peran PDIP dalam pemenangan

	tentang Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenangkan Pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko Pada Pilgub Jateng 2013	pasangan Ganjar Pranowo – Heru sudjatmoko memiliki tingkatan yang kuat yakni sebagai perekrut politik, mesin pengumpul suara dan sebagai penggerak basis massa atau mobilisasi massa.
4	Titin Purwaningsih (2015) tentang politik kekerabatan dan kualitas kandidat di Sulawesi Selatan	Kajian politik kekerabatan yang sebagian besarnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan dan kompetisi politik dalam pemilu, dari variabel internal kandidat.
5	Siti Munawaroh (2015) tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten bantul pada masa kepemimpinan Sri Suryawidati	Kinerja pemerintah kabupaten bantul pada saat kepemimpinan Sri Suryawidati, dan calon <i>incumbent</i> memiliki kekalahan terbesar walaupun di wilayah ini berbasis PDIP.
6	Titin Purwaningsih (2016) politik dinasti dalam dinamika pemilihan daerah	Isu politik dipilkada serentak tahun 2015, adanya kandidat petahana yang mengundurkan diri untuk memuluskan kerabatnya dalam pencalonan Kepala Daerah.
7	Aji Tri Susilo Wahyu, tentang pengaruh politik dinasti dan system pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah dengan akuntabilitas pelaporan sebagai variabel mediasi	Evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah (EKPPD), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).
8	Nugraheni persepsi partai politik terhadap proses pencalonan non partai di pemilihan umum kota Yogyakarta tahun 2017	Peraturan komisi pemilihan umum mengenai pemilihan kepala daerah melalui jalur independen.
9.	Raden Prawangsa Jaya Ningrat (2015), ersepsi masyarakat terhadap adat sasak terhadap pendidikan politik yang dilakukan oleh	Pendidikan masyarakat politik terhadap masyarakat suku adat sasak, pendidikan politik sebagi pendidikan orang dewasa.

	partai demokrat	
10	Kinanthi Dyah Harumming, persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan trasformatif Sri Purnomo dalam implementasi smart regency dikabupaten sleman tahun 2018	Kualitas kepemimpinan menjadi buruk karena banyaknya pemimpin yang koruptif atau terjerat kasus KKN dan sejenisnya.
11.	Nuritomo dan Hilda Rossieta, Politik Dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Kangan Pemerintah Daerah di Indonesia. SNA 17 Mataram, Lombok, Universitas Mataram 24-27 September 2014.	Politik Dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Politik dinasti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas publik yang diproyeksikan oleh sistem penegndalian intern dapat meminimalisasi dampak negatif Politik Dinasti terhdap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

F. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Adapun definisi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Bantul sesuai dengan yang dikemukakan oleh Secord dan Bacman (1994) yang membagi sikap menjadi dua komponen yaitu :

1. Komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu objek sikap.
2. Komponen afektif adalah komonen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehigga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap.

Menurut Putri (2014), lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perilakunya sehari – hari sehingga timbul makna spontan yang akan ditampilkan pada perilaku, dengan demikian perilaku individu tidak terlepas dari persepsinya. Persepsi seseorang akan dipengaruhi oleh suatu objek yang persepsinya belum jelas atau belum dikenal sama sekali tidak akan memberikan makna. Seseorang akan bias mempresentasikan persepsinya terhadap suatu obyek apabila seseorang tersebut sudah dapat perngaruh dari suatu obyek tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Kimball (dalam Putri. 2014). Persepsi merupakan sesuatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, mempresentasikan dan memahami objek fisik maupun social.

Menurut Sebagian (dalam Putri, 2014) secara umum ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :

- 1) Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut mempengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.
- 2) Sasaran terhadap persepsi. Sasaran yang digunakan pada persepsi bisa berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat – sifat peristiwa biasanya berpengaruh terhadap persepsi oaring yang dilihatnya. Ciri – ciri lain dari sasaran persepsi itu turut menentukan cara pandang orang dalam berperilaku.
- 3) Situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan fakta yang turut berperan dalam pertumbuhan persepsi seseorang.

Sejalan dengan yang dikemukakan Kasali (dalam Putri, 2014), faktor – faktor lain yang juga menentukan persepsi, yaitu :

- 1) Latar belakang budaya
- 2) Pengalaman masa lalu
- 3) Nilai-nilai yang dianut
- 4) Berita-berita yang berkembang

Menurut Rukminanto (dalam Putri, 2014) ada beberapa hal penting dalam membicarakan persepsi, yaitu:

- 1) *Impression Formation*, proses dimana informasi tentang orang lain diubah menjadi pengetahuan atau pemikiran yang relatif menyerap orang tersebut. Hal ini terbentuk melalui pengkategorian berdasarkan teori kepribadian yang implisit, mempertimbangkan atau mengkbinasiakan segi positif serta negative dan praduga.
- 2) *Attribution*, karena manusia tidak mempunyai akses untuk mengetahui pikiran, motif maupun perasaan orang lain, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menduga perilaku yang akan dilakukan orang tertentu pada saat yang lain.
- 3) *Social Relationship*, kehadiran orang lain memengaruhi tingkah laku yang dapat terbentuk karena imitasi (peniruan), konformitan (serupa dengan imitasi namun ada saksi apabila tidak ditiru) dan kepatuhan (banyak diterapkan dalam dunia militer).
- 4) *perhatian*, merupakan permusuhan atau konsentrasi dan seluruh aktivitas ditentukan kepada sesuatu atau kelompok objek.

Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal (perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi dan kerangka acuan) dan eksternal (stimulus, dan keadaan lingkungannya dimana persepsi itu berlangsung). Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Apabila berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang di persepsi tersebut tidak ada untuk mempengaruhi yang mempersepsi (Jalaludin,

dalam Putri, 2014). Salah satu penulis yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah teori persepsi menurut Kasali, yang dikemukakan oleh Putri (2014) karena dalam teori tersebut menyebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Salah satunya ialah latar belakang budaya yang erat kaitannya dengan pluralitas yang diangka dengan penelitian ini.

2. Politik

a. Pengertian Politik

Politik merupakan serapan dari bahasa Yunani yaitu *politikos* yang memiliki arti dari, untuk atau yang berkaitan dengan warga negara (Partanto dan Barry, 2001). Dijelaskan pula secara etimologi, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Menurut Partanto dan Barry (2001), politik adadalah suatu ilmu pengetahuan urusan dan tindakan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan (*system* atau dasar pemerintah), pemerintah negara terhadap negara lain untuk mempengaruhi atau menghadapi suatu masalah dengan bijaksana.

Dijelaskan pula derivative kata politik antara lain berpolitik, memolitikkan, memperpolitikkan. Politik adalah suatu sikap ilmu kenegaraan atau tata negara sebagai sikap kolektif untuk mendapatkan suatu kekuasaan (Partanto dan Barry, 2001: 608). Dalam Bahasa Arab politik juga disebut *siyasyah* yang kemudian diterjemahkan menjadi *siasat* atau yang lebih dikenal sebagai *politic*.

Politik dapat pula diartikan cerdas dan bijaksana dalam pengambilan keputusan pembicaraan sehari-hari diungkapkan sebagai cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan (Syafiie, 2012). Menurut (Syafiie, 2012), pada intinya ruang lingkup politik adalah negara,

karena teori politik yang telah diteliti negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu politik juga meneliti ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan, disamping itu politik yang meneliti hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pendapat umum, peranan partai politik yang berada pada pemilihan umum.

Apabila politik dipandang sebagai ilmu dengan alasan memiliki obyek, subyek, metodologi, system, terminology, ciri, teori serta dapat diajarkan maupun dipelajari, maka sebuah lembaga internasional yang dikenal dengan sebutan UNESCO membagi ilmu tersebut menjadi beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain (Syafiie, 2012):

- 1) Lingkup teori politik yang mencakup tentang Teori Politik dan Sejarah Perkembangan Ide Politik.
- 2) Lingkup Lembaga Politik yang mencakup tentang Undang-Undang Dasar, Pemerintahan Negara, Pemerintahan Daerah, Administrasi Negara dan Perbandingan Lembaga Politik.
- 3) Lingkup Kepartaian, Golongan dan Pendapat Umum yang mencakup tentang Partai Politik, Kelompok Penekan dan Partisipasi Warganegara dalam Pemerintah.
- 4) Lingkup Hubungan Internasional yang mencakup bidang Politik Internasional, Organisasi Internasional dan Hukum Internasional.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berkembang ruang lingkup ilmu politik semakin meluas ke seluruh aspek – aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terjadi tumpang-tindih antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya terutama ilmu-ilmu kenegaraan seperti pemerintahan, administrasi public, tata negara dan sebagainya, maka ilmu politik kembali dijabarkan kedalam beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain (Syafiie, 2012) :

- 1) Bidang Kebijakan Pemerintah meliputi Pengambilan Keputusan Pemerintah, Sistem Pendelegasian Wewenang dan Hubungan Pusat dan Daerah.
- 2) Bidang Ekonomi Politik meliputi Politik Perdagangan Dunia, Globalisasi Ekonomi dan Kutub-Kutub Ekonomi yang Berpengaruh.
- 3) Bidang Sosial Politik meliputi Pengkajian Keberadaan Kelompok Kepentingan dan Penekan dan Telaah Budaya Politik.
- 4) Bidang Psikologi Politik meliputi Teori Penguasaan Massa, Teori-Teori Demokrasi, Normalisasi Kehidupan Masyarakat, Politik Manajemen Konflik dan Politik Manajemen Kolaborasi.
- 5) Bidang Filsafat Politik meliputi Etika Politik, Logika Politik, Estetika Politik, Sekularisme Politik, Politik Agama, Retorika Politik dan Politik Islam.
- 6) Bidang Pelayanan Politik meliputi Administrasi Pemerintahan Daerah dan Pusat, Teori-Teori Organisasi dan Manajemen Pemerintahan.
- 7) Bidang Aturan Politik meliputi Perubahan dan Pembentukan Konstitusi, Legitimasi Kekuasaan, Peraturan-Peraturan, Daerah dan Pusat, Diintegrasikan dan Bubarnya Negara, serta Penjajahan dan Penggabungan Negara.

Menurut (Budiarjo, 2008), ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik (*politics*) atau kepolitikan, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu system politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan *resources* yang ada.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk

menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses dengan cara yang bersifat persuasi (menyakinkan) dan paksaan (*coercion*) (Budiardjo, 1972: 8). Menurut Laswell dan Kaplan (dalam Budiardjo, 2008), ilmu politik memperajari pemebeentukan dan pebagiaan kekuasaan. Noer (dalam Budiardjo, 2008) menyebutkan, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Fletcheim (dalam Budiardjo, 2008) juga mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat tujuan dan negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Ditekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.

Kekusaan adalah suatu hal yang bersifat krusial dan tidak lepas dari istilah-istilah politik yang telah didefinisikan sebelumnya. Secara umum dikatakan politik adalah kekuasaan. Budiardjo (1972) mengungkapkan definisi kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.

Di antara banyak bentuk kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri (Budiardjo, 1972). Menurut Wirawan (2003), salah satu tenaga penggerak perubahan peradaban umat manusia adalah kekuasaan atau *social power*.

Conoly dan Lukes (dalam Budiardjo, 2008) menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan. Kekuasaan juga didefinisikan oleh Laswell dan Abraham (dalam Budiardjo, 2008), yaitu suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang

dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama. Serupa dengan yang telah dirumuskan oleh Dodwin (2003), kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh berangkutan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan.

3. Politik Dinasti

a. Pengertian Politik Dinasti

Menurut (Purwaningsih, 2015) politik dinasti menngacu beberapa pendapat dari Dal Bo Casey, Querobin dan Hes. Dari beberapa pendapat ini muncul dimensi dan konsep politik dinasti atau politik kekerabatan yang mencangkup dimensi waktu, dimensi jumlah, dan dimensi kekuasaan. Sehingga dapat diartikan dengan kata lain politik dinasti ini merupakan politik perathanan/memperbesar kekuasaan yang mencangkup kekuasaan lingkup keluarga sehingga mendapatkan jabatan dua orang atau lebih. Dari fenomena tersebut terdapat politik pertahanan/memperbesar kekuasaan merupakan fenomena politik dinasti, yang muncul di fenomena pilkada yang tidak jarang lagi kita jumpai. Namun dengan adanya fenomena terseut sering juga bukan disebut fenomena politik dinasti karena menurut mereka masih mengandung konsep politik kelemahan, bahwa politik yang mereka peroleh bukan merupakan hasil politik pelemanan namun hasil tersebut diperoleh dari pemilihan hasil pemilu. Hal ini sebagaimana pendapat keluarga politik bukan merupakan politik dinati namun merupakan hasil pemeilihan rakyat dari pemilukada. Sebab inilah hal tersebut menjadikan politik dinasti masih menjadi pro dan kontra.

Almond dan Verba (1989; 269-270) mengemukakan bahwa sosialisasi politik pengalaman politik yang bersifat kumulatif memperngaruhi kemampuan politik seseorang. Dengan kata lain bahwa sosialisasi politik dalam keluarga mempernagruhi kualitas candida politik yang akan dipilihnya. Penelitian ini menyangkun *legacy* politik yang telah dimiliki,

baik *legacy* politik maupun sosial yang memengaruhi kualitas kandidat yang notabene berasal dari keluarga politik.

Kualitas kandidat adalah kemampuan kandidat yang dimiliki oleh kandidat yang memungkinkan dirinya untuk dipilih dan mendapatkan jabatan politik dan telah menunjukkan kapabilitas sebagai seorang politisi (Jacobson dan Kemell 1983), dengan demikian belum ada indikator yang pasti untuk mengukur kualitas kandidat. Kualitas maupun kompetensi politik menurut Almond dan Verba dipengaruhi oleh pengalaman politik sebelumnya antarlain menyangkut hal dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun pekerjaan yang telah dimilikinya (1989:301) menyatakan bahwa keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan aktif dan tidaknya dalam politik semakin baik kompetensinya.

Jacobson dan Kemell (1983), mengemukakan bahwa kualitas kandidat data diukur dari pengalaman politik sebelumnya. Dari berbagai pendapat tersebut maka kualitas kandidat dapat dilihat dari tiga variabel yaitu tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik yang dimiliki kandidat sebelumnya. Pengalaman politik itu sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aktivasinya dalam partai politik, pengalaman dalam organisasi, dan pengalaman dalam pekerjaan sebelumnya. Analisis yang didapat tersebut digunakan untuk menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi berkembangnya politik kekerabatan yang berada di Kabupaten Bantul yang mengacu pada teori sosialisasi dari Almond dan Verba serta Prewitt dan Martinez.

Menurut Qodari 2013 aspek positif politik dinasti antara lain, figur yang maju sebagai kepala daerah sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah menjalani pendidikan politik di dalam keluarganya, sehingga sudah memiliki modal politik. Figur dari politik dinasti, menurut dia, sudah memiliki rekam jejak politik yang panjang sesuai dengan perjalanan politik keluarganya. Sedangkan aspek negative dari politik dinasti itu sendiri antara lain,

sistem politik di daerah cenderung masih tertutup sehingga menyuburkan tumbuhnya politik dinasti. Figura dari politik dinasti yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah juga rawan melakukan penyimpangan jabatan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Zulkie flimansyah dalam Yossy Nurmansyah (2015), setidaknya ada tiga dampak negative adari politik dinasti. Pertama politik dinasti akan menghambat fungsi ideal partai politik. Calon yang dipilih bukan calon yang terseleksi dan melalui proses kaderisasi, melainkan hanya berdasarkan popularitas dan kekerabatan dengan pertahana. Kedua, tertutupnya kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai kualitas dan kapasitas untuk tampil sebagai pemimpin karena bukan berasal dari lingkaran elite kekuasaan. Jika ini terjadi akan memunculkan potensi terjadinya negosisai dan konspirasi kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Ketiga, sulitnya mencapai *clean and good governance* karena fungsi control melemah dan semakin tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten menduduki suatu jabatan, dan juga sebaliknya, menghalangi orang yang kompeten untuk tampil menjadi abdi masyarakat.

Argumen yang mereka peroleh sejalan dengan keputusan MK yang menganulir pasal 7 UU no 8 tahun 2015. Syarat kepala daerah mengikuti pemilihan yaitu tidak memiliki masalah politik dengan pertahana. Bagian penjelasan pasal 7 UU tersebut yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus keatas, kebawah, keamping dengan pertahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) masa jabatan. Berdasar UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

b. Faktor-faktor Politik Dinasti

Politik dinasti yang muncul di Indonesia menunjukkan beberapa asumsi bahwa dengan berkembangnya politik dinasti maka kemungkinan besar rakyat hanya akan disuguhkan aktor-aktor politik yang itu-itu saja yang berasal dari satu keluarga. Menurut Karyudi Sutajah Putra dan Siti Zuhro ada empat faktor munculnya politik dinasti sebagai berikut:

- a. Posisi dalam partai
- b. Kekuatan jaringan
- c. Kekuatan modal
- d. Demokrasi yang tidak sehat (Zuhro, 2009).

4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini terapat sebuah variable, yaitu Politik Dinasti. Variable Politik Dinasti ini merujuk pada kajian empiris yang dilakukan oleh Buchari (2014). Menurutnya, Politik Dinasti merupakan akulturasi partisipasi politik yang terkotruksi dari akar budaya masyarakat terutama keluarga, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus didalam kebudayaan atau kekeluargaan masyarakat dalam suatu jalinan inetraksi sosial.

Kajian empiris diarahkan sebagai landasan berfikir untuk mengatasi persoalan-persoalan klasik yang muncul pada keluarga Politik Dinasti. Dari kajian empiris tersebut, peneliti akan mengkaji persepsi Politik Dinasti dari kacamata masyarakat. Dalam kajian empiris ini pula akan mengidentifikasi sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap dinamika politik local di daerah tersebut.

G. Definisi Konseptual

Fokus dalam penelitian ini ialah konsep persepsi Politik Dinasti pada dominan perilaku masyarakat terhadap politik saat ini, sehingga definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergreted dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan fikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Selain itu persepsi dipengaruhi oleh tiga sikap yaitu : kognitif (kesadaran), afektif (perasaan), konatif (perilaku). Tiga sikap tersebut kemudian dapat disimpulkan menjadi evaluatif terhadap suatu objek tertentu. Dari sinilah persepsi masyarakat dapat muncul dan dinilai memihak atau tidak terhadap suatu objek sikap dan kecenderungan potensial untuk bereaksi yang merupakan hasil interaksi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling bereaksi didalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap objek sikap tertentu.

2) Konsep politik dinasti

Konsep paradigma proses, menggantikan dalam kata, jika tidak dipindahkan sinkronis tipologi dan dan fungsioanal berhubungan dengan bentuk politik, seperti

garis keturunan dan pemerintahan. Dalam tepatnya, mereka menyerahkan metodologi yang mengembangkan politik-politik sebagai dinamis, pengendali proses yang berhubungan dengan membangun tim, formasi golongan, dan strategi yang memimpin perolehan kekuatan. Awal dari tujuan konseptualisasi politik terutama mengacu pada pencapaian perbedaan dan penggunaan kekuasaan oleh anggota kelompok yang bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang berbeda.

Penekanan dalam paradigma ini memberikan gambaran bahwa proses politik tidak jauh dengan adanya suatu konflik yang sangat mempengaruhi perubahan sistem politik. Hal ini sekaligus menekankan bahwa konseptualisasi dalam politik sebagai proses yang berkaitan dalam penentuan dan pelaksanaan tujuan politik atas hasil capaian yang berbeda-beda, tentunya sangat berkaitan penggunaan kekuasaan (*power*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu dengan tujuan-tujuannya.

3) Keterlibatan politik dinasti dengan demokrasi

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidak setaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini mengingatkan kembali kekhawatiran Mosca bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan dalam posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan (dkk, 2009).

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkonsetrasi merebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kenyataannya masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialisasinya sebagai akibat dari adanya fenomena *political dynasty*. Jika demokrasi memiliki asrti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maa dinasti politik ini telah menciptakan pragmantisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara menggunakan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1985:30). Adapun definisi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu objek sikap.
2. Komponen afektif adalah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehigga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Variabel	Indikator
1	Persepsi Masyarakat	1. Komponen kognitif 2. Komponen afektif
2	Politik Dinasti dari aspek kognitif (pengetahuan)	1.Kesesuaian Politik Dinasti dengan Budaya Masyarakat 2.Politik Dinasti bertentangan dengan demokrasi 3.Kualitas calon dari Politik Dinasti sama dengan yang tidak Politik Dinasti 4.Politik Dinasti tidak korupsi

	Politik Dinasti dari aspek afektif (perasaan)	5.Politik Dinasti cenderung korupsi 6.Politik Dinasti tidak demokrasi 7.Politik Dinasti didukung parpol 8.Kualitas demokrasi dan korupsi 9.Politik Dinasti lebih mementingkan kepentingan keluarga 10.Politik Dinasti menghambat calon dari calon masyarakat umum 11.Calon dari Politik Dinasti lebih berkualitas 12.Politik Dinasti lebih cenderung menyalahgunakan kekuasaan 13.Saya tidak setuju dengan Politik Dinasti
--	---	--

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah pertama pada saat pengumpulan informasi oleh peneliti yang ingin melakukan suatu penelitian mengenai suatu objek atau peristiwa. Dalam melakukan pengumpulan informasi peneliti harus melakukan investigasi mendalam mengenai suatu objek atau peristiwa terkait penelitian tersebut. Dalam metode ini terdapat gambaran dari keseluruhan berjalannya suatu penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Sewon yang dimana daerah ini menjadi salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang terdapat adanya penyimpangan politik yaitu Politik Dinasti. Politik Dinasti ini dilakukan langsung oleh Kepala Daerah pada masa jabatan Idham Samawi yang diwariskan kepada Istrinya Sri Suryawidati yang menjadi

pengembangan tugas politik kekerabatan. Pertimbangan penelitian ini dilakukan di daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Politik Dinasti di Bantul merupakan politik kekerabatan yang dilakukan Idham Samawi (suami) kepada Sri Suryawidati (istri).
- b. Mayoritas masyarakat masih awam dengan adanya politik local yang sedemikian rupa.
- c. Didasari dengan jelas ingin mengetahui respon dari masyarakat setempat yang masih awam dengan politik dinasti.

2. Jenis Penelitian

Metode – metode penelitian pada umumnya melibatkan proses pengumpulan analisis dan interpretasi data, serta penulisan – penulisan hasil penelitian. Akan tetapi hasil dari survei ini muncul lebih spesifik yang biasanya muncul pada identifikasi sampel dan populasi. Penentuan strategi penelitian, pengumpulan data, analisis data, penyajian hasil penelitian, penafsiran, dan penulisan hasil penelitian.

3. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Sugiyono berpendapat populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek dimana objek tersebut memiliki karakteristik tertentu dan kualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian diteliti dan kemudian menghasilkan simpulan. Populasi adalah jumlah keseluruhan individu dari unit analisis data (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masyarakat Sewon yang berjumlah 71.349 jiwa.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik ini menentukan subjek harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Mereka dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi tertentu. Pilihan atas sampling purposive karena peneliti menguji pertimbangan-pertimbangannya untuk memasukkan unsur subjek yang dianggap khusus dari suatu populasi (Silalahi, 2015).

c. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi.

Sampel dalam penelitian ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Sewon yang berjumlah 71349 jiwa. Penelitian ini menggunakan rumus slovin karena penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana (Sugiyono, 2008).

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

N = jumlah sampel

N = populasi

e = prosentase pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir e= 10%

$$N = \frac{71349}{1 + 71349(0,1)^2}$$

$$N = \frac{71349}{714,49}$$
$$=99,86$$

Hasil tersebut kemudian dibulatkan oleh peneliti menjadi 100.

4. Sumber data, Variabel dan Skala Pengukuran

a. Sumber Data

Data Primer

Menurut (Arikunto, 2006) data primer ialah data yang diucapkan secara lisan, gerak tubuh/perilaku dilakukan oleh subjek penelitian dengan syarat sumber tersebut harus tepercaya, artinya narasumber/informan yang terkait dengan penelitian atau data yang ingin diperoleh dan dilakukan oleh peneliti secara langsung.

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner

Kuesioner adalah memberi pertanyaan tertulis kepada responden, dan pertanyaan tersebut diberikan secara langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat di Kecamatan Sewon Bantul. Ada 2 (dua) komponen dalam kuesioner.

b. Instrumen penelitian

Instrument penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Menurut

(Sugiyono, 2008) instrument penelitian adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian”. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang digunakan dengan menggunakan kuesioner tertutup, dimana kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternative jawaban.

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuisisioner penelitian ini adalah teknik skala *Linkert*. Penggunaan skala *linkert* menurut (Sugiyono, 2008) adalah “skala *Linkert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social”.

Menurut (Sugiyono, 2008) mengemukakan bahwa “macam-macam skala pengukuran dapat berupa : skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio., dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio”.

6. Validitas dan Realibilitas Instrumen

a. Validitas Instrumen

Valid adalah suatu hal yang dilakukan dalam sebuah penelitian saling terkait antara ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran yang dilakukan sesuai standar yang seharusnya. Menurut (Sugiyono, 2008) validitas adalah suatu tolok ukur yang menandakan kevaliditasan instrumen, suatu instrument penelitian yang dapat dikatakan valid adalah instrument yang dapat berjalani sesuai dengan fungsinya dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur.

Hasil dari penghitungan validitas kuesioner pada uji realibilitas dan validitas yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2019 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

sebagian butir pernyataan dari kuesioner tidak valid. Pernyataan tersebut tidak valid karena kurang dari r tabel yang sudah ditetapkan yaitu 0.3061. Data dinyatakan valid apabila nilai *correctem item correlation* (r hitung) lebih besar dari 0,2 atau lebih besar dari r table.

Beberapa pernyataan tersebut antara lain pernyataan yang menyinggung tentang latar belakang budaya, berita-berita yang berkembang, kekuatan jaringan/modal, dan pernyataan tentang budaya yang tidak sehat. Adapun contoh pertanyaan diantaranya yaitu :

1. Menurut saya calon bupati atau pejabat yang merupakan Istri/Suami/Anak/Saudara dari bupati tidak menghilangkan kesempatan politik orang lain karena hal tersebut lumrah terjadi di Sewon.
2. Sejauh pengalaman saya calon bupati atau pejabat yang merupakan Istri/Suami/Anak/Saudara dari bupati saat ini tidak menyalahgunakan kekuasaan.
3. Menurut saya calon bupati atau pejabat yang merupakan Istri/Suami/Anak/Saudara dari bupati saat ini tidak mendengarkan dan melaksanakan aspirasi masyarakat.
4. Menurut informasi yang saya dapatkan calon bupati atau pejabat yang merupakan Istri/Suami/Anak/Saudara tidak menghilangkan kesempatan politik orang lain ataupun saya.

b. Reliabilitas Instrumen

Hasil dari perhitungan reliabilitas pada uji realibilitas dan validitas yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sama di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul hampir semua butir pernyataan dinyatakan reliable. Pernyataan tersebut reliable karena angka yang diperoleh untuk menetapkan hasil reliable dan tidaknya mencapai

nilai yang sudah ditetapkan yaitu nilai cronbach alphanya lebih besar atau sama dengan 0,6.

7. Teknik Analisis Data

a. Analisis Kuantitatif Deskriptif

Menurut Sofian Effendi dan Chris Manning dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995 : 263) analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian deskriptif statistik Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti, yang termasuk dalam analisis data statistic deskriptif adalah penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, mean dan skor deviasi. Dalam analisis data ini, data dari masing-masing variabel akan ditentukan, di antaranya:

1. Penskoran

Dalam penelitian ini untuk mengetahui keseluruhan nilai dari persepsi masyarakat tentang politik dinasti dalam ranah politik lokal di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, maka digunakan klasifikasi/pengelompokan sebagai berikut :

Nilai maksimal = skor tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

$$= 5 \times 100 \times 13 = 6.500$$

Nilai minimal = skor terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

$$= 1 \times 100 \times 13 = 1.300$$

Rentang Kelas = Jumlah nilai tertinggi – Jumlah nilai terendah

Jumlah Skor

$$= \underline{6.500 - 1.300} = 1.040$$

5

Dengan nilai tersebut dapat dibuat kategori sebagai berikut :

$$\text{Sangat Setuju} = 5.460 - 6.500$$

$$\text{Setuju} = 4.420 - 5.460$$

$$\text{Kurang Setuju} = 3.380 - 4.420$$

$$\text{Tidak Setuju} = 2.340 - 3.380$$

$$\text{Sangat Tidak Setuju} = 1.300 - 2.340$$

Maka dalam penelitian ini digunakan skala linkert untuk menggambarkan persepsi masyarakat berdasarkan garis kontinum digambarkan sebagai berikut :

Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
6.500	5.460	4.420	3.380	2.340

Konsep operasional

1. Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal disekitar penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
2. Persepsi masyarakat adalah tanggapan/respon masyarakat yang diberikan oleh masyarakat mengenai keberadaan politik dinasti di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
3. Politik dinasti adalah politik kekerabatan yang terjadi di Kecamatan Sewon.
4. Populasi adalah keseluruhan masyarakat di Kecamatan Sewon
5. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi.
6. Latar belakang budaya adalah warisan budaya yang telah dipercaya dan diturunkan oleh penduduk setempat.
7. Pengalaman masalah adalah pengalaman yang telah dialami masyarakat Sewon.
8. Nilai-nilai yang dianut adalah sesuatu hal yang sudah dipercayai dan menjadi patokan untuk dijadikan pedoman hidup masyarakat Sewon.
9. Berita-berita yang berkembang adalah komparasi dari latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan disertakan dengan berita-berita yang berkembang sekarang supaya tidak ketinggalan dengan zaman yang sudah berkembang.
10. Kekuatan jaringan dan modal adalah suatu modal politik yang sangat dibutuhkan oleh pelaku politik.
11. Kualitas demokrasi dan korupsi adalah apabila kualitas demokrasi di suatu negara itu buruk maka tidak sering juga di dalam elemennya akan rentan dengan praktik korupsi.